

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TORAJA.

Ruben S. Kannapadang
e-mail: rubenkannapadang@gmail.com

UKI Toraja

ABSTRAK

Dalam meningkatkan pelayanan bidang pengelolaan dan pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tana Toraja, maka dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan implementasi akuntansi pemerintahan. Penelitian ini adalah bagian keuangan dan akuntansi Dukcapil Tana Toraja sebagai pengguna anggaran. Teknik pengambilan data didasarkan pada dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan implementasi akuntansi pemerintahan. Hasil peneliti menunjukkan bahwa implementasi akuntansi pemerintahan yang dikembangkan pada Dukcapil Kabupaten Tana Toraja sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dan prinsip akuntansi pemerintahan, di mana pada setiap akhir tahun pengelolaan keuangan disusun dalam laporan pertanggungjawaban bentuk Neraca dan Realisasi Pendapatan dan Belanja.

Pendahuluan.

Akuntansi merupakan suatu teknik pencatatan secara sistimatis, menggolong-golongkan, menafsirkan dan mengikhtisarkan mengenai peristiwa keuangan pada organisasi, baik organisasi usaha sebagai organisasi profit, maupun pada organisasi nirlaba termasuk organisasi atau instansi pemerintahan. Implementasi akuntansi pemerintahan dalam tulisan ini merupakan kasus untuk pemerintah daerah Kabupaten yang memiliki Dinas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah (Perda) dan diselenggarakan oleh salah satu

dinas selaku wakil bupati yakni Dinas penyelenggara dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).

Undang-undang otonomi daerah no. 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, di mana memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah akan memaksakan pemerintah daerah berusaha untuk mencari sumber-sumber dana untuk mengelola pemerintahan dan membiayai berbagai sektor pembangunan daerah bersangkutan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan

salah satu dinas yang bertanggung jawab membantu tugas bupati, dan sekali gus sebagai salah satu dinas yang produktif mengelola kekayaan dan asset daerah berupa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan APBD, juga dituntut untuk melaksanakan pencatatan keuangan dan asset milik daerah secara sistimatis, sesuai dengan Sistim Informasi Akuntansi Pemerintahan (SIAP) sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan selanjutnya diatur dalam PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 55/2005 Sistim Informasi Keuangan Daerah, dan PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistematika penyajian implementasi Akuntansi Pemerintahan Kabupaten dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan semua data yang diperlukan oleh entitas akuntansi, kemudian berdasarkan data dan transaksi yang ada dilakukan proses pencatatan secara sistimatis untuk masing-masing entitas yang ada.

Sesui dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba memilih judul proposal ini yaitu Analisis Pelaksanaan Sistim Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.

Bahan dan Metode

Metode yang digunakan adalah model akuntansi pemerintahan yang

mengacu pada aktivitas yang ada dalam kegiatan pengelolaan Negara/Daerah, yang dihubungkan dengan akuntansi pemerintahan terdiri dari 2 (dua) kelompok, yakni:

1. Pengelolaan dana kepemilikan (proprietary fund). Aktivitas ini berhubungan dengan kegiatan bisnis (business-type activities).
2. Pengelolaan dana Pemerintahan (governmental funds). Aktivitas ini murni berhubungan dengan langsung dengan operasional pemerintahan.

Pada kondisi ini akuntansi pemerintahan dikelompokkan menjadi dua model, yaitu model akuntansi dana kepemilikan (the proprietary fund accounting model), dan model akuntansi pemerintahan umum (the general accounting model).

Model akuntansi dana kepemilikan mirip dengan model akuntansi entitas bisnis. Agar mudah dipahami, maka model ini akan dijelaskan melalui pendekatan persamaan akuntansi (accounting equation), yaitu sebagai berikut:

$$(CA) + (NCA) - (CL) + (LTL) = (CC + RE)$$

Di mana:

- a. CA = Current Asset, yaitu harta yang dimiliki oleh entitas yang dioperasikan dalam satu periode akuntansi, seperti kas, sediaan dan piutang.
- b. NCA = Non Current Asset, yaitu harta yang digunakan melampaui satu atau lebih periode akuntansi,

seperti bangunan, kendaraan, tanah dan asset tetap lainnya.

- c. CL = Current Liability, adalah merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan dalam satu periode akuntansi.
- d. LTL = Long Term Liability, yaitu kewajiban jangka panjang.
- e. CC = Contributed Capital, berupa modal yang dimiliki entitas.
- f. RE = Retained Earning, yaitu berupa penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh entitas.

Tipe transaksi untuk kodel akuntansi dana kepemilikan hampir sama dengan transaksi dalam entitas bisnis, seperti:

- 1. Penjualan dan pendapatan jasa.
- 2. Pembelian dan penggunaan sediaan.
- 3. Kerugian piutang.
- 4. Pembelian aktiva tetap, perlengkapan dan bahan baku.
- 5. Depresiasi aktiva tetap.
- 6. Beban-beban
- 7. Beban yang belum dibayar.

Sedang laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Laporan pendapatan, beban dan perubahan pendapatan ditahan (nd equity).
- 2) Neraca (balance sheet).
- 3) Laporan arus kas (cash in flow and cash out flow).

Perbedaan dengan tipe bisnis adalah adanya beberapa cara pengukuran akun aktiva tertentu seperti hutang, pendapatan dan beban, serta pengaruh dari transaksi

yang berhubungan dengan operasional pemerintahan.

Aktivitas umum pemerintahan, seperti administrasi umum, pengadilan, kesehatan masyarakat membawa model pemerintahan umum menjadi dua tipe, yaitu Tipe Dana Pemerintahan, dan Tipe Grup Akuntansi tertentu.

- a. Dana pemerintahan (Govermental Funds).

Tipe dana pemerintahan menganut model entitas modal kerja (working capital entities), dan persamaan akuntansi adalah sebagai berikut:

$$CA - C = FB$$

Sedangkan laporan keuangannya adalah:

- 1. Neraca
- 2. Laporan pendapatan, pengeluaran, dan perubahan dalam aktiva bersih.

- b. Account Groups

Transaksi yang berhubungan dengan perolehan aktiva tetap dan utang jangka panjang dicatat dan dilaporkan terpisah dari akuntansi dana secara umum, dan dilaporkan tersendiri. Akuntansi aktiva tetap menganut pada persamaan akuntansi sebagai berikut:

$$\text{Aktiva Tetap} = \text{Investasi Dalam Aktiva Tetap.}$$

Basis akuntansi merupakan standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Menurut Mursyidi

(2009 : 7) bahwa terdapat dua basis akuntansi yang kita kenal yaitu:

1. Basis kas (cash bases), merupakan model pengakuan dalam akuntansi di mana pendapatan diakui, dicatat, dan dilaporkan apabila uang sudah diterima oleh kas; dan beban diakui, dicatat, dan dilaporkan apabila uang telah dikeluarkan dari kas. Basis ini tidak mengakui adanya pendapatan yang masih harus diterima, dan beban yang masih akan dibayar. Uang yang telah diterima dari pendapatan untuk lebih dari satu periode seluruhnya diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi di mana pendapatan tersebut telah diterima oleh kas. Begitu pula uang yang telah dikeluarkan oleh kas, yang manfaat pembayarannya adalah beberapa periode berikutnya, diakui sebagai pengeluaran pada periode di mana pengeluaran tersebut telah dikeluarkan oleh kas.
2. Basis Akrua (accrual bases), merupakan metode akuntansi di mana mengakui pendapatan baik yang telah diterima uangnya maupun yang masih harus diterima hanya untuk satu periode akuntansi, dan mengakui beban baik yang telah dikeluarkan uangnya, maupun yang masih harus dikeluarkan hanya untuk satu periode akuntansi.

Pengelolaan keuangan daerah mengikuti ketentuan undang-undang

di bidang keuangan Negara. Menurut Mursyidi (2009 : 12) menuliskan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari fungsi manajemen, yang diawali dengan fungsi perencanaan dan penganggaran, dan selanjutnya diikuti dengan fungsi pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada pengelolaan keuangan negara/daerah, siklus tersebut terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, dan pemeriksaan.

Reformasi bidang keuangan dimulai dengan penyempurnaan proses penganggaran, sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang dilakukan melalui pendekatan:

1. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran.
Dalam penyusunan anggaran digunakan pendekatan antara rencana kerja dan penganggaran. Rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan, yang disusun secara terintegrasi. Untuk melaksanakan konsep ini Pemerintah Daerah harus memiliki rencana kerja dengan indikator kinerja yang terukur sebagai prasyarat.
2. Penyatuan anggaran.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai satu dokumen anggaran. Kepala SKPD bertanggung jawab secara formil

dan materiil atas penggunaan anggaran di kantornya.

3. Penganggaran berbasis kinerja.

Konsep yang digunakan dalam anggaran ini adalah sesuai dengan hasil yang hendak dicapai, terutama berfokus pada *output* atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan.

4. Klasifikasi anggaran.

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan, pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan mengacu pada *Government Finance Statistic* (GFS). Klasifikasi anggaran dimaksud terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja.

Setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, maka SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian maka fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran. DPA disusun secara rinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Dokumen ini disertai dengan rencana penarikan dana untuk mendanai kegiatan dan apabila dari kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan maka rencana penerimaan kas juga dilampirkan. DPA disampaikan kepada kepala SKPD untuk dimintakan pengesahan.

Selanjutnya atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, ada dua

sistim yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistim penerimaan dan sistim pembayaran.

a. Sistim Penerimaan.

Seluruh penerimaan daerah harus disetor ke kas umum daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pungutan.

b. Sistim Pembayaran.

Belanja membebani anggaran daerah setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terdapat pengaturan yang ketat tentang sistim pembayaran. Dalam sistim pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, yaitu pengguna anggaran dan bendahara umum daerah (BUD). Dalam hal sistim pembayaran dilakukan dengan dua cara yakni; (1) pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh BUD untuk belanja yang jumlahnya relatif cukup besar atau di atas jumlah tertentu; (2) menggunakan Uang persediaan (UP) melalui bendahara pengeluaran untuk belanja yang jumlahnya relatif kecil atau di bawah jumlah tertentu untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran.

Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengikuti suatu sistim dan prosedur akuntansi. Sistim ini diperlukan untuk tujuan:

1. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas

pembagian kerja dan tanggung jawab di antara mereka.

2. Untuk terselenggaranya pengendalian interen untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
3. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai PP 24/2005 tentang SAP.

Pendapatan yang dikelola oleh pengguna anggaran adalah bukan pajak dan retribusi untuk daerah. Pendapatan jenis ini pada umumnya terkait dengan jasa yang diberikan oleh instansi yang mengelola. Selanjutnya adalah proses akuntansi yang terkait dengan belanja, baik itu yang dilakukan dengan menggunakan uang persediaan, maupun dengan sistem langsung. Akuntansi atas belanja akan merupakan kegiatan yang paling banyak dan rumit dibandingkan dengan akuntansi atas transaksi-transaksi lainnya karena itu merupakan bagian utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Sebagai pengguna anggaran, satuan kerja juga wajib melakukan pencatatan atas asset yang dikelola dan digunakan.

Dari kegiatan akuntansi oleh satuan kerja sebagai pengguna anggaran, pada akhir periode akan menghasilkan tiga laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Metode

Adapun Teknik analisis data yang digunakan menganalisis data adalah dengan pendekatan analisis deskriptif, di mana penulis mencatat, memaparkan serta mendeskripsikan fakta yang diperoleh dari objek penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada awalnya bernama Kantor Catatan Sipil. Sejalan dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah sesuai Peraturan Daerah No. No. 16 tahun 2000 16 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi daan Tn Tataa Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja maka kantor Catatan Sipil berubah nama menjadi Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, dKerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja maka kantor Catatan Sipil berubah nama menjadi Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, di mana pada saat itu membawahi dua subdinas yakni Subdinas Transmigrasi dan Subdinas Tenaga Kerja.

Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, akhirnya melakukan perubahan dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini sudah barang tentu membawa paradigma baru, baik dari struktur organisasi maupun fungsi dan tugasnya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang bertugas membantu Bupati menyelenggarakan tugas kependudukan dan pencatatan sipil.

Implementasi Akuntansi Pemerintahan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu entitas Akuntansi Pemerintahan berpedoman pada Modul Pelatihan *Training of Trainers* (TOT).

Data yang disajikan pada uraian berikut diasumsikan memiliki dokumen yang relevan dan valid, sehingga dianggap tidak perlu disebutkan kembali dalam setiap kejadian dan

transaksi. Jenis-jenis data yang relevan dijelaskan dalam sistim Akuntansi Pemerintahan.

Sistematika penyajian implementasi akuntansi pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan lebih dahulu memberikan semua data yang diperlukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan, kemudian berdasarkan data dan transaksi yang ada dilakukan proses akuntansi.

Berikut ini adalah implementasi akuntansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2016**

DATA UNTUK MENYUSUN NERACA AWAL		
1	Saldo awal kas sisa persediaan	Rp 286.702.230
2	Penerimaan asli Dinas selama tahun 2016	Rp 253.340.000

Sumber: Dinas Kekendudukan dan Pencatatan Sipil
Data diolah kembali.

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA**

NO	U R A I A N	JUMLAH
PENDAPATAN		
1	Retribusi penggantian biaya cetak dan akta catatan sipil	Rp 214.640.000
2	Retribusi Jasa usaha	Rp 38.700.000,-
J u m l a h		Rp 253.340.000,-
BELANJA		
1	Belanja tidak langsung	Rp 1.741.646.697,-
2	Belanja langsung	Rp 1.247.036.614,-
J u m l a h		Rp 2.988.683.311,-

Sumber: Dinas Kekendudukan dan Pencatatan Sipil
Data diolah kembali.

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2016
NERACA 31 DESEMBER 2016**

NO	U R A I A N	JUMLAH
I. Aset.		
a. Aset Lancar		
1	Kas	Rp 0,-
2	Piutang	Rp 0,-
3	Persediaan alat tulis kantor	Rp 1.059.000,-
4	Persediaan barang cetakan	Rp 285.343.230,-
5	Persediaan peralatan kebersihan	Rp 300.000,-
Jumlah Aset lancar		Rp 286.702.230,-
b. Aset Tetap.		
6	Tanah	Rp 150.100.000,-
7	Gedung dan Bangunan	Rp 1.101.588.500,-
8	Jalan dan Jembatan	Rp 4.614.148.000,-
9	Kendaraan Peralatan dan mesin	Rp 2.577.329.850,-
Jumlah aset tetap		Rp 8.433.166.350,-
Total aset (a + b)		Rp 8.729.868.580,-
II. Kewajiban dan Ekuitas'		
a. Kewajiban		
1	Kewajiban jangka pendek	Rp 0,-
2	Kewajiban jangka panjang	Rp 0,-
Jumlah kewajiban		Rp 0,-
b. Ekuitas		
3	Ekuitas dana cadangan persediaan	Rp 286.702.230,-
4	Ekuitas dana investasi	Rp 8.443.166.350,-
Total Kewajiban dan Ekuitas		Rp 8.729.868.580,-

**Sumber: Dinas Kekendudukan dan Pencatatan Sipil
Data diolah kembali.**

Implementasi akuntansi pemerintahan yang dikembangkan dan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, berpedoman pada peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri

Dalam Negri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada prinsipnya pengelolaan akuntansi pemerintahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja telah menggambarkan prinsip akuntansi

sektor nir laba secara umum, di mana telah dilakukannya proses pencatatan baik, belanja maupun penerimaan, hingga sampai pada pelaporan keuangan akhir tahun dalam bentuk realisasi penerimaan dan belanja yang menggambarkan tingkat operasinal Dinas dan Laporan Neraca yang menggambarkan harta, kewajiban dan ekuitas.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa pos keuangan khususnya pada pos belanja baik belanja langsung, maupun belanja tidak langsung yang belum dicatat secara sistimatis. Hal ini dipandang dan dengan anggapan sebagai belanja yang ditangani langsung oleh Bendahara Umum Daerah, walaupun manfaatnya adalah berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.

Kondisi demikian menunjukkan laporan keuangan realisasi pendapatan dan realisasi belanja menjadi tidak berimbang, di mana realisasi pendapatan berjumlah Rp 253.340.000,- , sementara realisasi belanja berjumlah Rp 2.988.683.311,-. Selisih kedua pos keuangan ini sangat besar, yang jika disamakan dengan akuntansi keuangan sektor publik, menunjukkan kerugian yang sangat besar. Oleh sebab itu sebaiknya belanja yang bersumber dari APBD yang tidak dikelola secara langsung oleh Dinas perlu dicatat sebagai penerimaan lintas Daerah, sebelum dicatat dan dilaporkan sebagai belanja dinas.

Kesimpulan.

Dari uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam tulisan peneliti skripsi ini, maka dapatlah

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja adalah merupakan salah satu bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak terlepas dari salah satu entitas Akuntansi Pemerintahan, yang bertanggung jawab mengelola keuangan dan aset daerah yang dipercayakan kepadanya.
2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dan prinsip akuntansi pemerintahan, di mana pada setiap akhir tahun pengelolaan keuangan disusun dalam laporan pertanggungjawaban bentuk Neraca dan Realisasi Pendapatan dan Belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikoesoema Soemita R, (1996); Pengantar Akuntansi, penerbit; Milla jl. Golf Barat 25 Arcamanik Endah Bandung.
- Adikoesoema Soemita R, (1990), Sistem-Sistem Akuntansi (Accounting System); Edisi pertama, Penerbit; Sinar Baru Bandung.
- Afiah Nunuy Nur (2010); Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah; Edisi Pertama, cetakan Ke-2; penerbit, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Baridwan Zaki, Drs, Ak (1999), Intermediate Accounting, Edisi 2, Penerbit; Fakultas Ekonomi Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Baridwan Zaki, M.Sc, Akt, Prof, Dr. (2008), Intermediate Accounting, Edisi 8, Penerbit; Fakultas Ekonomi Universitas Gajahmada, Yogyakarta
- Hartanto, D (2001); Akuntansi Untuk Usahawan; penerbit; Fakultas Ekonomi Universitas indonesia, Jakarat – Indonesia.
- Mursydi, Drs, SE, M.Si (2009); Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Penerbit; PT. Refika Aditama Bandung.
- Mulyadi, Drs. Akt (1991), Akuntansi Biaya, Edisi 3, Penerbit; Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Univesrsitas Gajahmada – Yogyakarta.
- Simangnunsong M.P. Drs (1994); Pelajaran Akuntansi Tk. Dasar Dua & Trampil (Intermediate); Cetakan 2, Penerbit; Karya Utama, Jakarta.
- Kumpulan Peraturan Keuangan Daerah (2006); Penerbit; Deka Mandiri Jakarta.